



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

2025

Provinsi Jawa Barat

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI JAWA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. APBN TA 2025 disusun dengan mempertimbangkan faktor perekonomian global dan dilandaskan pada bauran kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut diperlukan agar peralihan pemerintahan dapat dilakukan secara lancar pada masa transisi. Kebijakan fiskal yang disusun diharapkan dapat menjawab tantangan, baik struktural maupun siklikal, yang berasal dari global dan domestik.

Pada tahun 2025, dunia diproyeksikan masih akan dihadapkan dengan berlanjutnya ketegangan geopolitik antarnegara yang menimbulkan perang, fragmentasi, proteksionisme, dan disrupsi rantai pasok sehingga menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Selain itu, suku bunga global yang bertahan tinggi, lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, dan gejolak pasar keuangan turut mempengaruhi risiko global. Indonesia mampu menjaga resiliensi perekonomian, investasi, dan ekspor, lebih baik dibandingkan global. Kita patut bersyukur dan bangga bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih tumbuh sebesar 5,1% di Triwulan ke-3 2024 (y-on-y).

Sebagai tahun pertama pemerintahan baru, tahun 2025 akan menjadi pilar penting untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sebelumnya. Belanja APBN menjadi instrumen untuk merespon tantangan struktural dan mengamankan dari berbagai guncangan (*shock absorber*), dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Akselerasi transformasi ekonomi terus ditingkatkan melalui revitalisasi industri termasuk hilirisasi dan ekosistem *electric vehicles (EV) industry*, penguatan sektor jasa termasuk ekonomi kreatif dan digitalisasi, serta penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan *ease of doing business*, dan memperkuat daya saing produk ekspor dan investasi.

Selanjutnya, guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dan keluar dari jebakan *middle income trap* diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, APBN harus didorong untuk semakin sehat agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan makro fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan program prioritas dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, APBN TA 2025 disusun sebagai jangkar untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan kebijakan *countercyclical* yang terukur dan terkendali. Indonesia perlu mengakselerasi

pertumbuhan ekonomi hingga 6 bahkan 8% agar mampu keluar dari *middle income trap* dengan cara menciptakan produktivitas untuk meningkatkan kemakmuran. Indonesia harus bisa membangun daya saing dan produktivitas di pasar dunia, serta menekan korupsi.

Pengelolaan fiskal daerah berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) beserta peraturan pelaksanaan turunannya. Sesuai tujuan pembentukannya, UU HKPD diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah. Adapun pokok arah kebijakan fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif;
3. Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, wellbeing*, dan konvergensi);
4. Perbaikan kualitas belanja APBD;
5. Penguatan *local taxing power*;
6. Pengembangan pembiayaan inovatif; dan
7. Memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) guna menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Sejalan dengan pokok arah kebijakan fiskal dan dalam rangka menghadapi tantangan strategis di atas, maka kebijakan TKD TA 2025 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dengan memperkuat penggunaan *earmarking* Dana Alokasi Umum (DAU), meningkatkan efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK), dan mengoptimalkan Dana Desa, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
2. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dimana TKD difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan pariwisata.
3. Menguatkan sinergi kebijakan fiskal dimana kebijakan TKD disinergikan dengan kebijakan fiskal pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperluas cakupan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga diharapkan kebijakan TKD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, alokasi TKD mengalami kenaikan dari

tahun ke tahun dan telah mencapai 25,8% dari total APBN TA 2025. Pada TA ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun, termasuk di dalamnya Dana Desa sebesar Rp71,0 triliun. Rincian alokasi masing-masing jenis Transfer ke Daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025.

Buku ini diterbitkan dalam rangka memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai alokasi masing-masing jenis dana TKD tersebut. Saya berharap, buku ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan APBD TA 2025. Mengingat pentingnya APBN TA 2025 sebagai pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang, maka saya berharap kepada segenap pemerintah daerah untuk segera memanfaatkan dana TKD tersebut sesuai dengan arah kebijakan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya untuk menjaga "Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan". Akhir kata, saya mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan TKD TA 2025. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 24 Oktober 2024

MENTERI KEUANGAN,



 SRI MULYANI INDRAWATI 

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2025	1
REKAPITULASI ALOKASI SE-PROVINSI JAWA BARAT	12
1. PROVINSI JAWA BARAT.....	14
2. KAB. BANDUNG.....	15
3. KAB. BEKASI.....	16
4. KAB. BOGOR.....	17
5. KAB. CIAMIS	18
6. KAB. CIANJUR.....	19
7. KAB. CIREBON	20
8. KAB. GARUT	21
9. KAB. INDRAMAYU	22
10. KAB. KARAWANG	23
11. KAB. KUNINGAN.....	24
12. KAB. MAJALENGKA	25
13. KAB. PURWAKARTA	26
14. KAB. SUBANG	27
15. KAB. SUKABUMI	28
16. KAB. SUMEDANG	29
17. KAB. TASIKMALAYA.....	30
18. KOTA BANDUNG	31
19. KOTA BEKASI	32
20. KOTA BOGOR	33
21. KOTA CIREBON.....	34
22. KOTA DEPOK	35
23. KOTA SUKABUMI.....	36
24. KOTA TASIKMALAYA	37
25. KOTA CIMAHI	38
26. KOTA BANJAR.....	39
27. KAB. BANDUNG BARAT	40
28. KAB. PANGANDARAN.....	41
TIM PENYUSUN BUKU.....	42

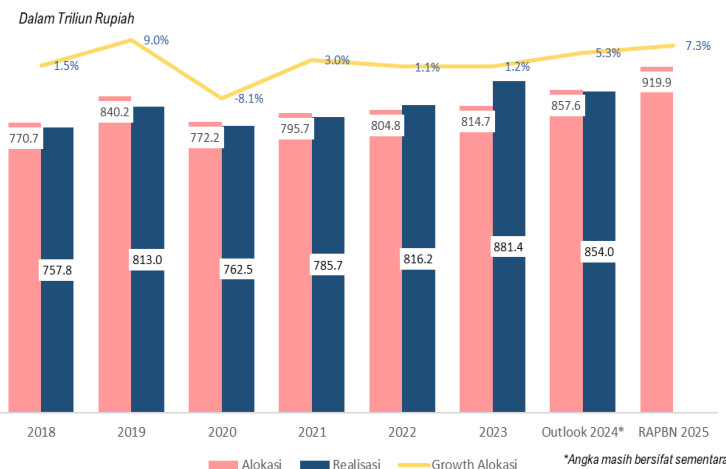


RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2025



TRANSFER KE DAERAH (TKD) TA 2025

Diarahkan untuk Mendorong Belanja Daerah yang Efektif dan Efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah



KEBIJAKAN UMUM TKD 2025

- 1 Sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah.
- 2 Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, wellbeing*, dan konvergensi).
- 3 Perbaikan kualitas belanja APBD.
- 4 Penguatan *local taxing power*.
- 5 Pengembangan pembiayaan inovatif.

Peningkatan alokasi TKD antara lain dipengaruhi oleh:

- peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui DBH,
- dukungan pendanaan untuk PPPK,
- penambahan target sasaran guru penerima dana TPG yang telah bersertifikasi, dan
- dukungan penganggaran untuk prioritas nasional

POSTUR TRANSFER KE DAERAH TA 2025

URAIAN	2023	2024	2024	2025
	Realisasi (Audited)	Perpres 76/2023	Outlook	RUU APBN 2025
1. Dana Bagi Hasil	205,7	143,1	143,1	192,3
2. Dana Alokasi Umum	398,0	427,7	427,7	446,6
- DAU tidak ditentukan penggunaannya	288,9	343,5	343,5	358,6
- DAU ditentukan penggunaannya :	109,1	84,2	84,2	88,0
▪ Penggajian Formasi PPPK	25,7	15,7	15,7	17,3
▪ Pendanaan Kelurahan	1,6	1,7	1,7	1,7
▪ Pendanaan Layanan Publik	81,7	66,8	66,8	69,0
3. Dana Alokasi Khusus	181,4	188,1	184,9	185,2
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	50,3	53,8	51,1	36,9
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128,1	133,8	132,7	146,7
c. Hibah ke Daerah	2,9	1,2	1,1	1,6
4. Dana Otonomi Khusus	17,2	18,3	18,3	17,5
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1,4	1,4	1,4	1,2
6. Dana Desa	69,9	71,0	70,9	71
7. Insentif Fiskal	7,9	8,0	7,8	6,0
TOTAL TKD	881,5	857,6	854,0	919,9

Penjelasan Pagu Anggaran TKD TA 2025:

DBH naik sebesar Rp 49,2 T karena:

- ✓ Peningkatan proyeksi penerimaan negara
- ✓ Alokasi Kurang Bayar DBH Rp27,8 T.

DAU naik sebesar Rp 18,9 T karena:

- ✓ Dukungan penggajian formasi ASND 2025 dan dukungan penggajian PPPK yang telah diangkat.
- ✓ Diusulkan untuk pergeseran DAU Penggajian PPPK ke DAU Yang tidak ditentukan Penggunaannya

DAK Nonfisik naik sebesar Rp 13,9 T karena:

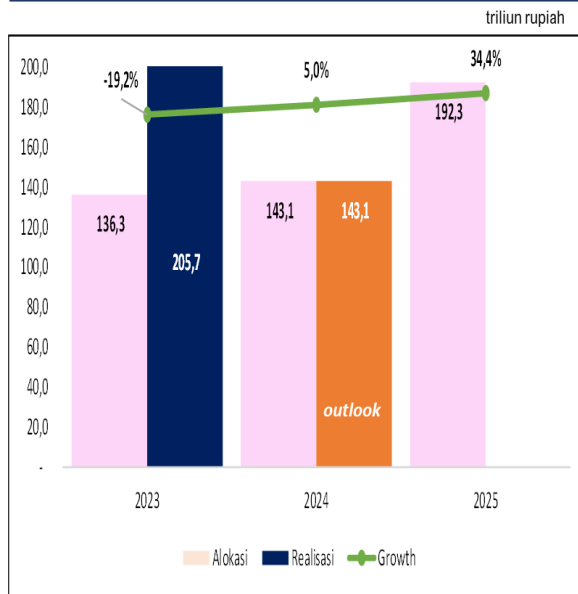
- ✓ Terutama adanya kenaikan sasaran guru bersertifikasi dan perluasan sasaran beberapa jenis DAK Nonfisik.

Beberapa jenis TKD mengalami penurunan karena:

- ✓ Untuk memberi ruang fiskal yang memadai sesuai strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL TA 2025

PERKEMBANGAN DBH TA 2023-2025



□ Pada tahun 2023, dilakukan penyelesaian KB DBH s.d. TA 2022 dan penambahan alokasi DBH reguler, sehingga total realisasi DBH menjadi Rp205,7 Triliun.

KEBIJAKAN DBH TA 2025

1. Alokasi DBH yang berkeadilan dan mendorong pelestarian lingkungan serta perubahan iklim.
2. Penyaluran DBH berdasarkan kinerja.
3. Penggunaan DBH *earmarked* untuk sektor prioritas dan penguatan sinergi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Transparansi dan akuntabilitas DBH.

POSTUR DANA BAGI HASIL TA 2025

(miliar rupiah)

Jenis DBH	2024 APBN	2025 RAPBN	Selisih	
			Rp	%
Pajak	55.773,9	77.302,8	21.528,9	38,6%
PPh	31.626,6	44.933,1	13.306,5	42,1%
PBB	19.166,6	25.970,8	6.804,2	35,5%
CHT	4.980,8	6.399,0	1.418,2	28,5%
SDA	84.326,0	85.921,0	1.595,0	1,9%
Migas	15.316,0	16.250,9	934,8	6,1%
Minerba	65.079,7	66.402,1	1.322,3	2,0%
Kehutanan	1.464,3	1.104,6	-359,6	-24,6%
Panas Bumi	1.475,8	1.426,6	-49,2	-3,3%
Perikanan	990,2	736,8	-253,3	-25,6%
Lainnya	3.000,0	1.249,9	-1.750,1	-58,3%
Perkebunan Sawit	3.000,0	1.249,9	-1.750,1	-58,3%
Kurang Bayar	0,0	27.808,0	27.808,0	
Total	143.099,9	192.281,7	49.181,8	34,4%

Alokasi DBH dalam RAPBN 2025 sebesar Rp192,3 triliun.

- Alokasi DBH Pajak sebesar Rp77,3 triliun, dengan **alokasi terbesar pada DBH PPh** sebesar Rp44,9 triliun.
- Alokasi DBH SDA sebesar Rp85,9 triliun, dengan **alokasi terbesar pada DBH Mineral dan Batubara** sebesar Rp66,4 triliun.
- Alokasi DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp1,3 triliun (4% dari perkiraan realisasi penerimaan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar tahun 2024).
- Alokasi minimum DBH Perkebunan Sawit per daerah sebesar Rp500 juta.
- Kurang Bayar DBH dialokasikan sebesar Rp27,8 triliun.

KEBIJAKAN PENGGUNAAN DBH EARMARKED TA 2025

DBH DR

- Optimalisasi penggunaan Sisa DBH DR Kab/Kota sesuai ketentuan perundangan
- Perluasan penggunaan kegiatan strategis lainnya antara lain :
 - ✓ Penguatan Integrated Area Development (IAD)
 - ✓ Pengelolaan kebersihan untuk pelestarian hutan
 - ✓ Pengelolaan jalan sekitar Kawasan
 - ✓ Dukungan pencapaian FOLU Net Sink 2030,
 - ✓ Bantuan jaminan sosial bagi pekerja sektor kehutanan kategori rentan,
 - ✓ Pengelolaan daerah aliran sungai.



DBH CHT

- Digunakan untuk bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.
- Penerima manfaat termasuk:
 - petani tembakau dan buruh tani tembakau.
 - petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
- Fleksibilitas penggunaan
 - Opsi pengalihan anggaran.
 - Penambahan menu kegiatan.

DBH Sawit

- Fokus pada infrastruktur jalan (minimal 80% dari alokasi).
- Mendorong pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan:
 - Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan.
 - Sertifikasi ISPO pekebun.
 - Rehab hutan dan lahan.
- Terdapat nilai alokasi minimum per daerah.

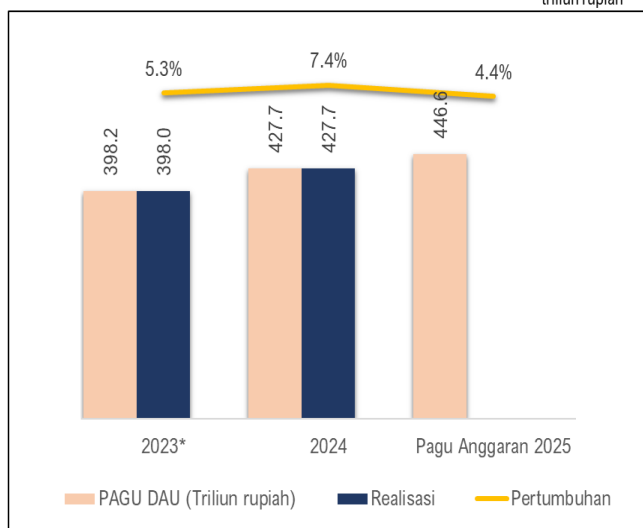


PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAU TA 2025

Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah

PERKEMBANGAN DAU TA 2023-2025

triliun rupiah



*TA. 2023 termasuk Tambahan DAU untuk THR/G13 Guru ASND sebesar Rp2.2 T
 **(Realisasi 2024 = Outlook 2024)

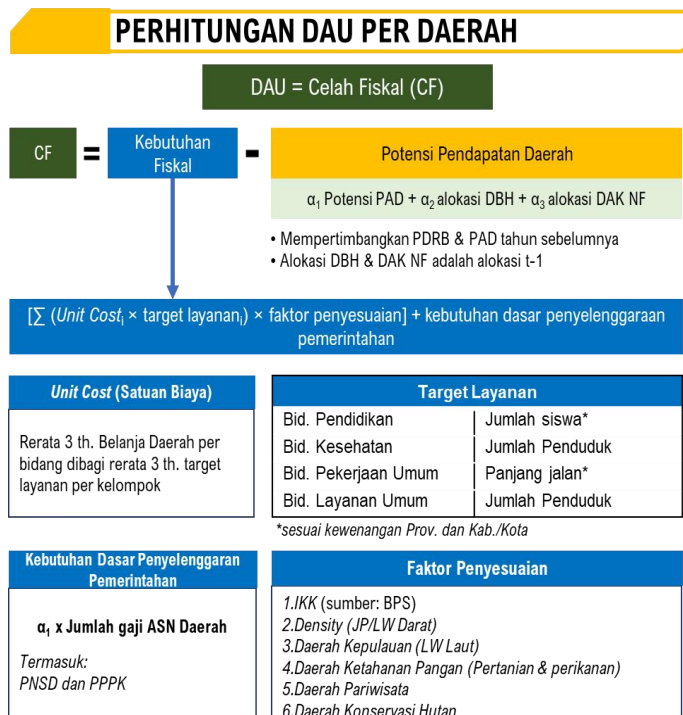
- Pagu DAU tahun 2025 tumbuh sebesar 4,4% dari tahun 2024.

KEBIJAKAN DAU TA 2025

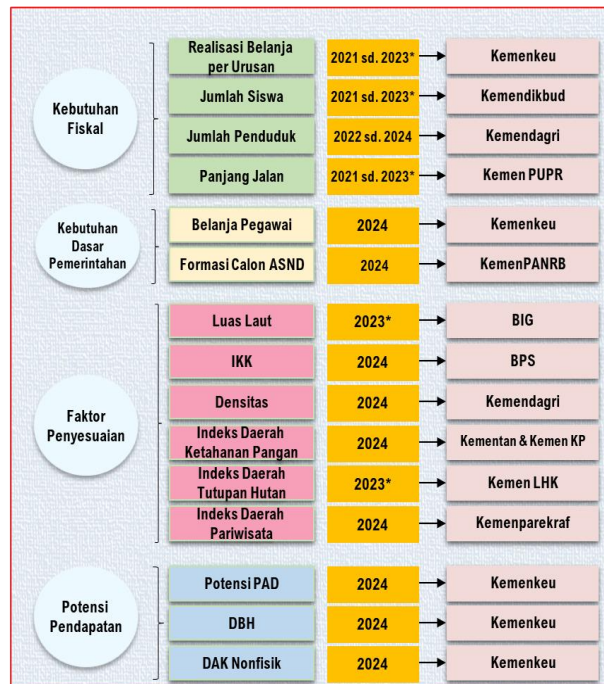
1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU diantaranya kebijakan **holdharmless** sampai 2027.
2. Memperkuat penggunaan **earmarking** DAU.
3. Menjaga tingkat **pemerataan keuangan daerah**.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola **earmarking** DAU.
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU berbasis **kinerja**.

DATA DASAR & FORMULA DAU TA 2025

Kebijakan formula dan data dasar perhitungan sama dengan tahun sebelumnya



DATA DASAR DAU



PAGU & PERKIRAAN PEMBAGIAN JENIS DAU TA 2025

(miliar rupiah)

NO	DAU	ALOKASI TA. 2024	ALOKASI TA. 2025		
			RUU APBN	Usulan Kesepakatan Panja TKD	SELISIH Usulan Kesepakatan Panja TKD dengan RUU APBN
1	DAU Blockgrant	343.527,6	358.617,9	360.515,9	1.898,1
2	DAU Earmarked	84.171,7	88.015,9	86.117,8	(1.898,1)
	DAU PPPK	15.676,7	17.253,2	15.355,14	(1.898,1)
	DAU Kelurahan	1.699,6	1.699,6	1.699,6	-
	DAU Pelayanan Dasar	66.795,4	69.063,1	69.063,1	-
	Total	427.699,3	446.633,8	446.633,8	0,0

- terdapat pergeseran Jumlah DAU Pengajian PPPK ke DAU Yang tidak ditentukan Penggunaanya



Penambahan alokasi DAU diarahkan untuk dukungan kebijakan penggalangan formasi ASD yang akan diangkat tahun 2025 melalui DAU Earmarked Penggalangan PPPK 2025, dan dukungan penggalangan PPPK eksisting dalam DAU Blockgrant



Penurunan DAU Earmarked dukungan bidang Pendidikan dipengaruhi oleh peningkatan capaian SPM bidang Pendidikan secara nasional.



Kenaikan DAU Earmarked dukungan bidang Kesehatan sebagai tambahan pendanaan untuk mendukung penurunan prevalensi stunting.



Kenaikan DAU Earmarked dukungan bidang Pekerjaan Umum untuk mendukung anggaran infrastruktur sesuai UU HKPD.



Komposisi DAU Earmark tahun 2025 sebesar 19,3% dari total DAU, lebih rendah jika dibandingkan komposisi DAU Earmark tahun 2024 yang sebesar 19,7% dari total DAU

PAGU & PERKIRAAN PEMBAGIAN JENIS DAU TA 2025

URAIAN	APBN 2024	RAPBN 2025
THEIL (<i>Weighted</i>) Tanpa DAU	0,21344	0,22857
THEIL (<i>Weighted</i>) Dengan DAU	0,14817	0,14257
Penurunan	- 30,6%	- 37,6%

HASIL PENGHITUNGAN ALOKASI DAU TA. 2025:

- Formula penghitungan alokasi dan data dasar DAU TA. 2025 melanjutkan perhitungan DAU TA. 2024 sesuai formula dalam UU 1/2022;
- Dalam alokasi DAU TA. 2025 telah mempertimbangkan **Kebutuhan Daerah terkait pembayaran gaji dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat tahun 2024.**
- Hasil perhitungan alokasi DAU TA. 2025 berhasil menurunkan **indeks Theil sebesar – 37,6 %** dari tanpa DAU sebesar 0,22857 menjadi 0,14257 dengan DAU.
- Sebagian alokasi DAU per daerah akan ditentukan penggunaannya, antara lain **untuk penggajian PPPK, pendanaan Kelurahan, dan peningkatan layanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.**

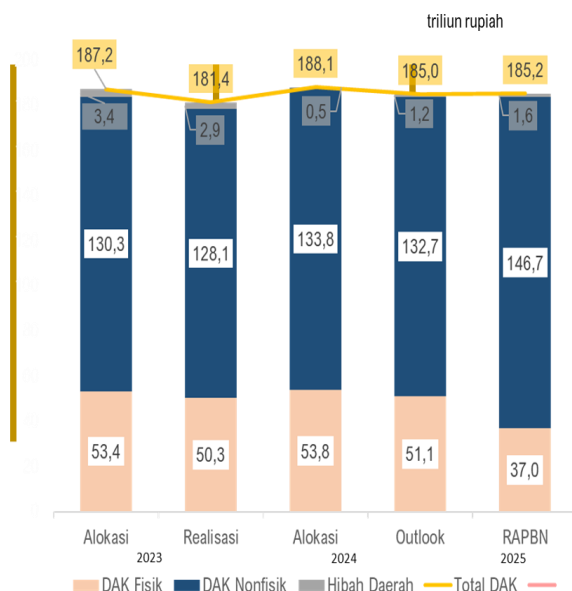
Kebijakan perhitungan alokasi

Penyesuaian alokasi DAU setiap Daerah

- Seluruh Daerah mendapatkan kenaikan alokasi minimal sebesar 2,5% dari alokasi tahun 2024 dan maksimal kenaikan 10% dari alokasi tahun 2024
- Dari penyesuaian tersebut diperoleh hasil:
 - Seluruh Daerah Provinsi mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4.04 %
 - Seluruh Daerah Kabupaten/Kota mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4.05 %

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAK TA 2025

PERKEMBANGAN DAK TA 2023-2025



- Pagu DAK tahun 2025 turun terutama karena pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat agar seluruh siswa/guru di Indonesia dapat menikmati standar kualitas pendidikan yang sama

KEBIJAKAN DAK TA 2025

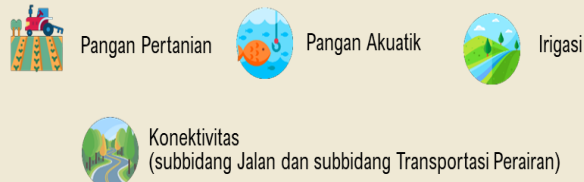
- DAK Fisik:** penyediaan **sarana-prasarana fisik layanan dasar** antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar.
- DAK Nonfisik:** **pendanaan operasional layanan publik terutama** bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pertanian, Sentra Industri dan Koperasi UMK.
- Hibah ke Daerah:** mendukung **transportasi perkotaan**, produksi pertanian di dataran tinggi/*upland*, pelestarian lingkungan hidup, serta pemulihan infrastruktur pasca bencana.
- Matching program** dan **sinergi pendanaan.**
- Meningkatkan kualitas pengelolaan DAK.**

DUKUNGAN, TEMA, & BIDANG DAK FISIK TA 2025

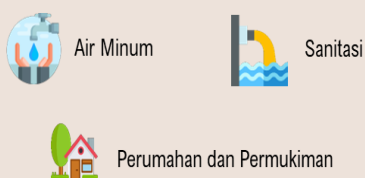
DAK Fisik Layanan Dasar



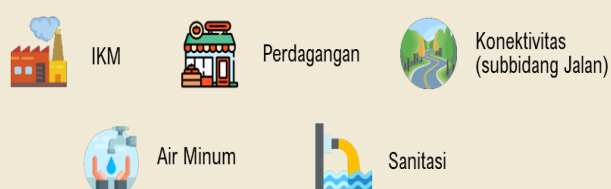
Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)



Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu

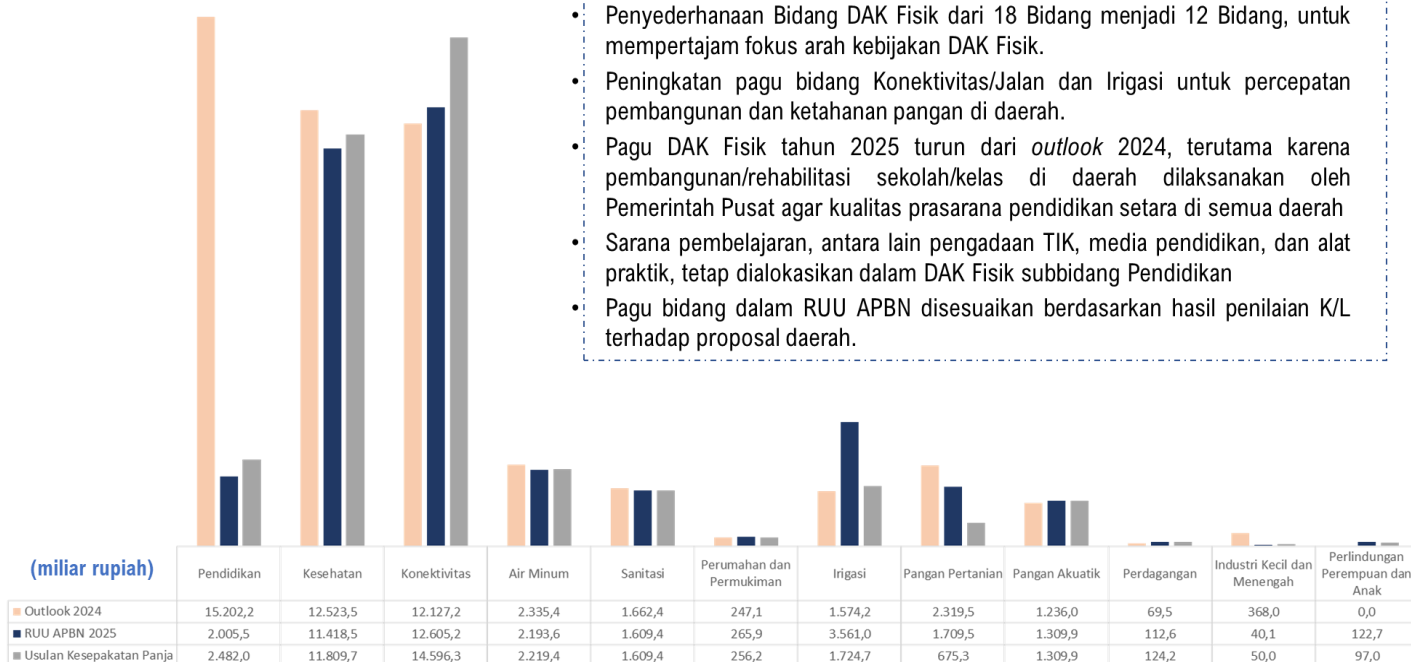


Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri



POSTUR DAK FISIK TA 2025

- Penyederhanaan Bidang DAK Fisik dari 18 Bidang menjadi 12 Bidang, untuk mempertajam fokus arah kebijakan DAK Fisik.
- Peningkatan pagu bidang Konektivitas/Jalan dan Irigasi untuk percepatan pembangunan dan ketahanan pangan di daerah.
- Pagu DAK Fisik tahun 2025 turun dari *outlook* 2024, terutama karena pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat agar kualitas prasarana pendidikan setara di semua daerah
- Sarana pembelajaran, antara lain pengadaan TIK, media pendidikan, dan alat praktik, tetap dialokasikan dalam DAK Fisik subbidang Pendidikan
- Pagu bidang dalam RUU APBN disesuaikan berdasarkan hasil penilaian K/L terhadap proposal daerah.



POSTUR DAK FISIK TA 2025

(Miliar Rupiah)

No	Bidang	Outlook 2024	APBN 2025		Selisih
			RUU	2025	
				Usulan/Kesepakatan Panja TKD	
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Pendidikan	15.202,2	2.005,5	2.482,0	476,5
2	Kesehatan	12.523,5	11.418,5	11.809,7	391,2
3	Konektivitas (Jalan+Transportasi Perairan)	12.127,2	12.605,2	14.596,3	
	- Sub Bidang Jalan	11.777,6	12.205,2	14.258,7	2.053,4
	- Sub Bidang Transportasi Perairan	349,6	399,9	337,6	-62,3
4	Air Minum	2.335,4	2.193,6	2.219,4	25,8
5	Sanitasi	1.662,4	1.609,4	1.609,4	-
6	Irigasi	1.574,2	3.561,0	1.724,7	-1.836,3
7	Perlindungan Perempuan dan Anak	-	122,7	97,0	-25,7
8	Perumahan dan Permukiman	247,1	265,9	256,2	-9,7
9	Pangan Pertanian	2.319,5	1.709,5	675,3	-1.034,2
10	Kelautan dan Perikanan/Pangan Akuatik	1.236,0	1.309,9	1.309,9	-
11	Perdagangan	69,5	112,6	124,2	11,6
12	Industri Kecil dan Menengah	368,0	40,1	50,0	9,9
	Lainnya	1.477,3	-	-	-
TOTAL DAK FISIK		51.142,5	36.953,9	36.953,9	-

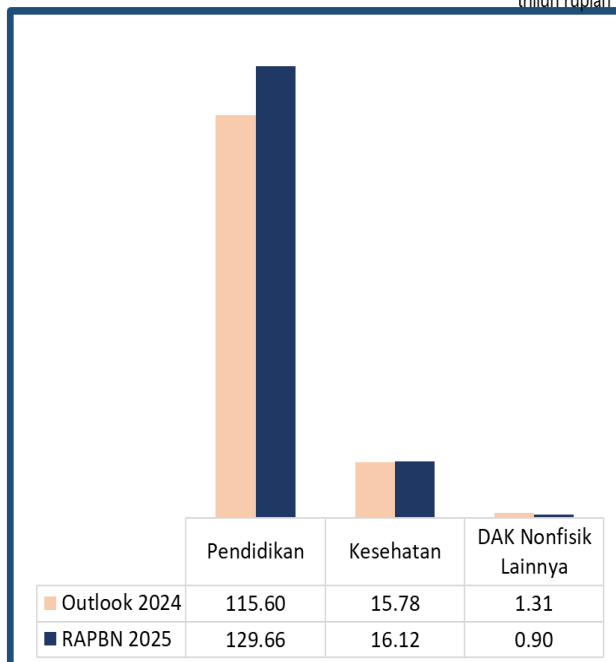
Berdasarkan penilaian atas usulan daerah dilakukan penyesuaian pagu bidang/sub bidang sebagai berikut:

- Pagu bidang irigasi, perumahan permukiman, perlindungan perempuan dan anak, serta pangan pertanian diturunkan sesuai hasil penilaian.
- Sisa pagu hasil penilaian dialihkan sesuai dengan prioritas pembangunan terutama ke bidang Pendidikan (Rp476 M), Kesehatan (Rp391 M), dan Jalan (Rp2,1 T)

POSTUR DAK NONFISIK TA 2025

PERKEMBANGAN DAK NON FISIK TA 2024-2025

triliun rupiah



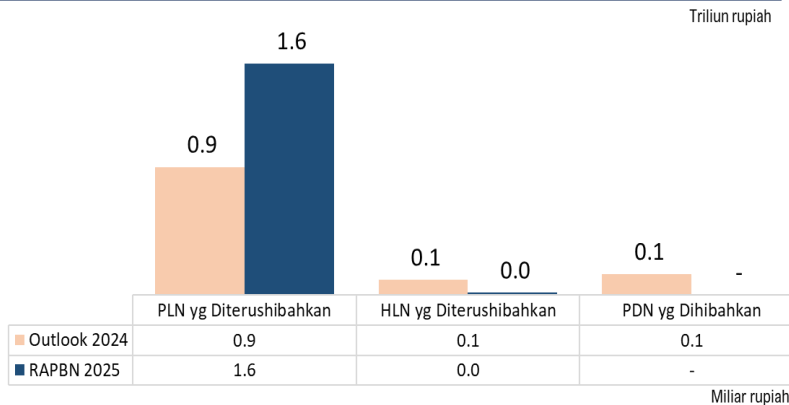
Simplifikasi Jenis dari sebelumnya 16 menjadi 14 jenis, dengan penambahan Pagu DAK Nonfisik karena:

- kenaikan jumlah guru bersertifikat, dan
- kenaikan sasaran terutama BOSP, PK2UMK, dan Pertanian.

No.	Rincian DAK NonFisik	Miliar rupiah	
		Outlook APBN 2024	RAPBN 2025
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.865,6	53.491,7
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	4.009,1	4.038,7
3	BOP Pendidikan Kesenian	1.618,8	1.741,2
4	Tunjangan Profesi Guru ASN	52.805,5	66.921,6
5	Tambahan Penghasilan Guru ASN	1.219,4	738,2
6	Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus	1.910,7	2.404,5
7	BOP Museum dan Taman Budaya	170,0	170,0
8	Dana BPP Perpustakaan Daerah	-	150,0
9	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12.541,8	12.878,7
10	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.239,3	3.239,3
11	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	250,0	163,7
12	Dana Pelayanan Kepariwisata	133,3	0,0
13	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	62,7	0,0
14	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	129,9	132,0
15	Dana Fasilitas Penanaman Modal	247,4	0,0
16	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	295,7	516,4
	- Subjenis Pangan		88,4
	- Subjenis Pertanian		211,7
	- Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian		216,3
17	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	194,9	92,0
TOTAL		132.694,1	146.677,9

POSTUR HIBAH DAERAH TA 2025

PERKEMBANGAN HIBAH DAERAH TA 2024-2025



Jenis Hibah kepada Daerah	Outlook 2024	RAPBN 2025 Nota Keuangan	Program/ Kegiatan
A. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	881,9	1.594,9	Pertanian, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup
B. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	102,9	14,1	
C. Penerimaan Dalam Negeri yang Diberikan	142,7	0	
Total	1.127,5	1.609,0	

- Pagu Hibah kepada Daerah TA 2025 dialokasikan untuk 3 jenis Hibah kepada Daerah (Hibah MRT, Hibah UPLAND, dan Hibah BioCF ISFL).
- Kenaikan** pagu Hibah kepada Daerah TA 2025 karena adanya peningkatan alokasi hibah untuk program MRT.

Target Output 2025, antara lain:



PERHUBUNGAN

- Lanjutan pembangunan jalur MRT Koridor Utara-Selatan Fase 2A sepanjang ± 5,8 km.
- Pembangunan jalur MRT Jakarta koridor Timur Barat Fase 1 Tahap 1 sepanjang ± 1,77 km.



PERTANIAN

- Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 102 km, terasering lahan seluas 15 ha, bantuan saprodi untuk 3.357 ha, dan pengadaan alsintan sebanyak 2.045 unit

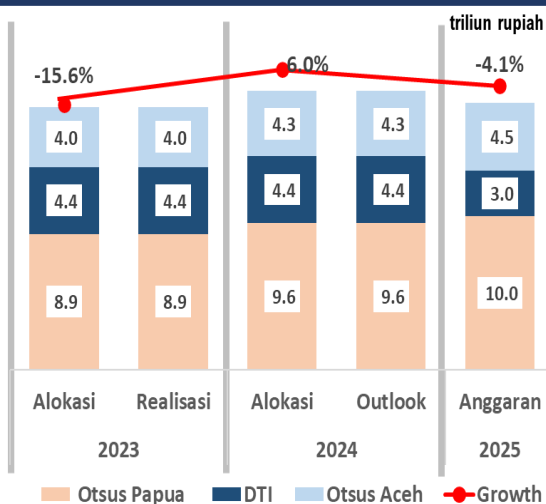


LINGKUNGAN HIDUP

- Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan sebesar 3 juta ton Co2eq; dan
- Pengelolaan area hutan dan lahan secara berkelanjutan pada 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA OTSUS & DTI TA 2025

PERKEMBANGAN OTONOMI KHUSUS TA 2023-2025



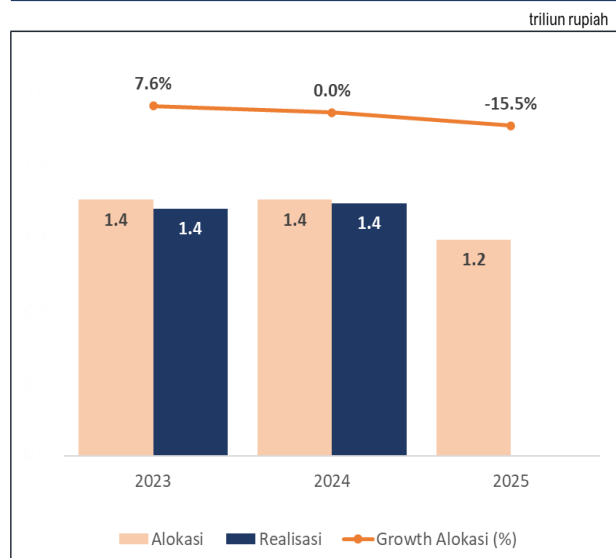
- Pagu Dana Otsus (Aceh dan Papua) TA 2025 meningkat akibat peningkatan pagu DAU.
- Pagu DTI TA 2025 lebih rendah karena strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS TA 2025

- Mendorong prioritas penggunaan Dana Otsus, untuk:
 - Penurunan kemiskinan:** perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan.
 - Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah:** penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan.
 - Mendukung capaian rencana induk** percepatan pembangunan papua untuk mewujudkan papua sehat, papua cerdas, dan papua produktif.
- Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus** melalui sinergi pendanaan APBN dan APBD guna mendukung pencapaian target pembangunan.
- Meningkatkan kualitas SDM** pengelola Dana Otsus terutama di DOB, melalui asistensi dan pembinaan yang intensif dan berkesinambungan.
- Penggunaan DTI pada DOB, diprioritaskan untuk pembangunan **infrastruktur penunjang** gedung perkantoran.

PERKEMBANGAN & KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2025

PERKEMBANGAN DAIS TA 2023-2025



- Pagu alokasi Dana keistimewaan 2025 lebih rendah karena strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah oleh K/L serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

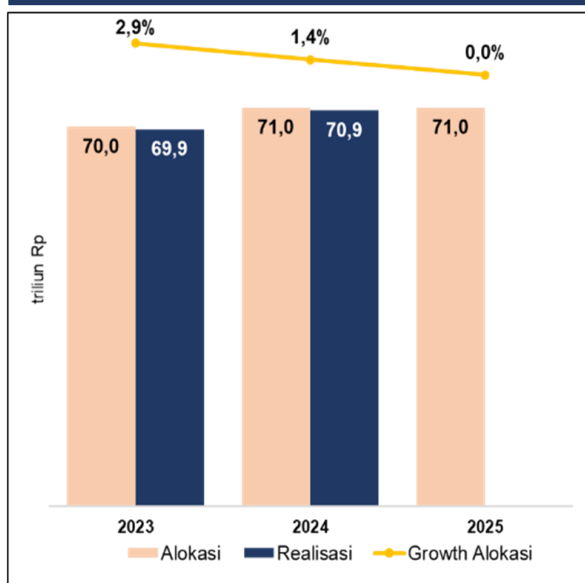
KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2025

- Mengarahkan **penggunaan** Dana Keistimewaan fokus untuk:
 - penurunan tingkat kemiskinan;
 - pemberdayaan masyarakat dan UMKM,
 - peningkatan penyediaan layanan dasar publik,
 - serta mengurangi belanja birokrasi penunjang, administrasi dan pengawasan;
- Meningkatkan **sinergi** dengan Belanja K/L untuk pencapaian **prioritas nasional** dengan mempertimbangkan prioritas daerah.
- Meningkatkan **tata kelola pemanfaatan** Dana Keistimewaan DIY yang inovatif, partisipatif, dan transparan **melalui** pengembangan **sistem informasi yang terintegrasi** secara berkelanjutan.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA DESA TA 2025

Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

PERKEMBANGAN DANA DESA TA 2023-2025



*) Outlook realisasi tahun 2024.

- Pagu Dana Desa tahun 2025 naik sebesar 0,2% dari outlook realisasi tahun 2024.

KEBIJAKAN DANA DESA TA 2025

- Mendorong peningkatan kemandirian desa & kualitas tata kelola Dana Desa melalui:
 - penyaluran Dana Desa berdasarkan fokus penggunaan yang ditetapkan,
 - penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD,
 - pemberian *reward* berupa alokasi kinerja dan insentif desa,
 - pemberian *reward* penyaluran Dana Desa lebih besar pada tahap I kepada desa berstatus Mandiri, dan
 - penerapan sanksi terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal.
- Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa melalui:
 - penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa paling tinggi 15%,
 - penguatan desa untuk aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim,
 - promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk stunting,
 - dukungan program ketahanan pangan,
 - pengembangan potensi dan keunggulan desa,
 - percepatan implementasi desa digital,
 - pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal,
 - operasional pemerintah desa paling tinggi 3%, dan/atau
 - program sektor prioritas lainnya di desa.
- Meningkatkan kualitas data keuangan desa berbasis elektronik terintegrasi dalam rangka memperkuat monitoring dan evaluasi.

FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA TA 2025

Pagu Rp71 T dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 Kab/Kota

Yang terdiri atas:

A

Sebesar **Rp69 T** pengalokasiannya dihitung sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula = AD + AA + AK + AF



Alokasi Dasar (AD) sebesar 65% dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk



Alokasi Afirmasi (AA) sebesar 1% dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak.

Dalam kurun 2022-2024, rata-rata penerima AA untuk Desa Tertinggal sebesar Rp106,6 juta/desa. Untuk Desa Sangat Tertinggal Rp167,2 juta/desa.



Alokasi Kinerja (AK) sebesar 4% (empat persen) dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. Penilaian AK dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota

Dalam kurun 2022-2024, rata-rata penerima AK sebesar Rp235,6 juta/desa.



Alokasi Formula (AF) sebesar 30% dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa



B

Sebesar **Rp2 T** dialokasikan dan disalurkan sebagai Insentif Desa pada tahun anggaran berjalan berdasarkan kinerja desa atas peningkatan tata kelola keuangan desa dan penghargaan yang diberikan oleh kementerian/lembaga



Pagu sebesar Rp2T dialokasikan kepada desa berdasarkan pemenuhan Kriteria Utama dan capaian Kriteria Kinerja. **Kriteria Kinerja meliputi:**

1. Kinerja Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:
 - o Kinerja Keuangan dan Pembangunan Desa
 - o Tata Kelola Keuangan dan Akuntabilitas Keuangan Desa
2. Penghargaan Kementerian/lembaga

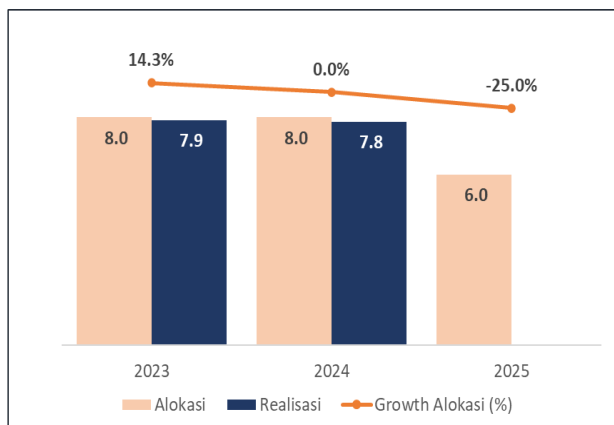


Penyaluran dilakukan terpisah dengan penyaluran pagu berdasarkan formula regular.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2025

Mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata Kelola APBD

PERKEMBANGAN DANA INSENTIF FISKAL TA 2023-2025



- Outlook penyaluran insentif fiskal 2024 sebesar Rp7,8 triliun, dimana terdapat beberapa daerah yang tidak dapat disalurkan karena tidak memenuhi syarat salur
- Pagu Insentif Fiskal tahun 2025 lebih rendah karena kinerja daerah juga diperhitungkan di alokasi DAU dan DBH serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

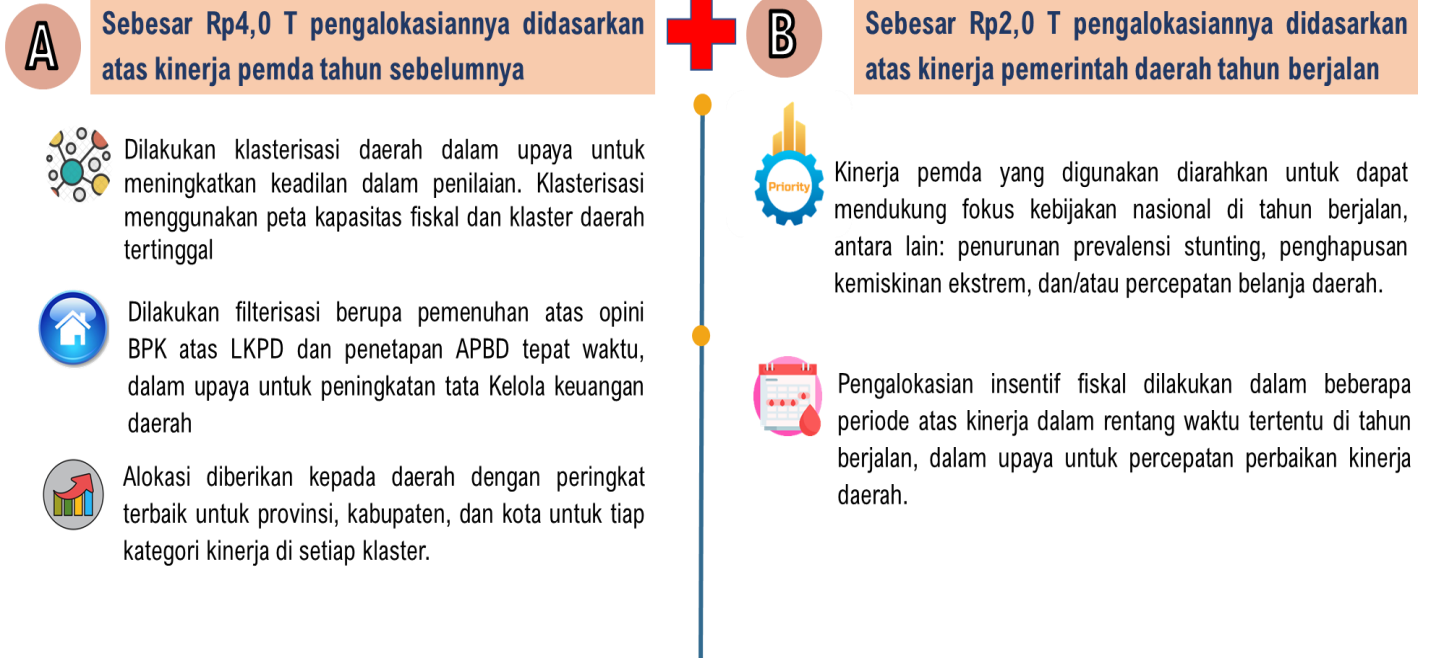
KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2025

1. Pengalokasian berdasarkan **kinerja tahun anggaran sebelumnya** dan **tahun anggaran berjalan**;
2. Indikator kinerja tahun sebelumnya meliputi **pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar**;
3. Indikator kinerja tahun berjalan meliputi dukungan **pencapaian target prioritas nasional**
4. Mendorong peran Insentif Fiskal untuk meningkatkan **kemandirian daerah**, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain.
5. Melanjutkan **pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal** dengan tetap memperhatikan kinerja daerah tertinggal.

FORMULA PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2025

Pagu Rp6,0 T dialokasikan Atas Kinerja Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan

Yang terdiri atas:





RINCIAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TA 2025



REKAPITULASI ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI JAWA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

NO	PEMERINTAH DAERAH	DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DAK FISIK	DAK NONFISIK	HIBAH KE DAERAH	DANA DESA	INSENTIF FISKAL	JUMLAH
1	PROVINSI JAWA BARAT	2.738.547.844	4.042.633.210	276.679.056	4.845.084.160	-	-	-	11.902.944.270
2	KAB. BANDUNG	490.351.540	2.607.774.432	253.605.792	1.070.020.781	-	396.180.329	6.922.806	4.824.855.680
3	KAB. BEKASI	614.388.265	1.535.073.528	75.929.842	938.721.920	-	284.967.870	-	3.449.081.425
4	KAB. BOGOR	409.775.711	2.700.082.763	92.501.549	1.652.142.543	-	625.225.108	-	5.479.727.674
5	KAB. CIAMIS	57.105.730	1.216.887.243	37.124.987	448.635.495	-	269.280.793	16.046.023	2.045.080.271
6	KAB. CIANJUR	110.786.200	1.912.715.694	81.141.156	881.445.223	-	443.232.501	14.200.362	3.443.521.136
7	KAB. CIREBON	81.586.254	1.803.300.515	121.616.979	788.538.817	13.439.040	466.991.316	-	3.275.472.921
8	KAB. GARUT	232.199.540	2.077.669.195	74.387.494	1.031.060.010	21.627.050	496.307.703	-	3.933.250.992
9	KAB. INDRAMAYU	200.269.493	1.519.527.010	30.408.610	566.659.347	-	352.520.661	7.115.602	2.676.500.723
10	KAB. KARAWANG	366.721.393	1.600.832.444	61.635.678	737.116.905	-	358.978.734	7.224.672	3.132.509.826
11	KAB. KUNINGAN	57.302.743	1.225.696.831	44.159.025	520.449.519	-	341.151.707	-	2.188.759.825
12	KAB. MAJALENGKA	68.649.182	1.250.789.429	73.013.600	518.709.649	-	329.095.620	13.663.372	2.253.920.852
13	KAB. PURWAKARTA	114.012.158	907.038.981	40.278.796	367.708.855	-	194.969.905	-	1.624.008.695
14	KAB. SUBANG	186.495.045	1.380.848.245	77.027.848	578.012.581	14.035.250	285.167.343	13.812.622	2.535.398.934
15	KAB. SUKABUMI	240.656.911	1.910.786.931	66.626.759	785.274.084	-	454.448.431	-	3.457.793.116
16	KAB. SUMEDANG	86.555.125	1.174.469.109	39.443.078	482.128.552	-	275.579.585	28.695.673	2.086.871.122
17	KAB. TASIKMALAYA	72.202.145	1.586.996.636	53.581.930	643.160.581	25.130.750	399.560.320	7.133.207	2.787.765.569
18	KOTA BANDUNG	412.408.811	1.858.511.513	23.194.354	725.303.917	-	-	-	3.019.418.595
19	KOTA BEKASI	194.732.576	1.477.177.456	8.076.043	676.079.071	-	-	-	2.356.065.146
20	KOTA BOGOR	110.420.689	891.897.296	25.697.193	355.951.584	-	-	16.327.907	1.400.294.669
21	KOTA CIREBON	70.787.605	626.787.717	60.684.822	162.787.320	-	-	-	921.047.464
22	KOTA DEPOK	135.260.828	1.157.909.471	22.960.640	480.057.705	-	-	6.837.475	1.803.026.119
23	KOTA SUKABUMI	67.476.839	527.027.624	16.918.396	139.716.994	-	-	-	751.139.853
24	KOTA TASIKMALAYA	63.579.070	818.141.128	30.121.702	256.283.978	-	-	-	1.168.125.878
25	KOTA CIMAHI	79.649.028	604.161.949	40.438.834	176.420.368	-	-	15.105.852	915.776.031



REKAPITULASI ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI JAWA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

NO	PEMERINTAH DAERAH	DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DAK FISIK	DAK NONFISIK	HIBAH KE DAERAH	DANA DESA	INSENTIF FISKAL	JUMLAH
26	KOTA BANJAR	51.945.999	405.515.260	11.503.152	84.700.565	-	18.552.134	7.260.689	579.477.799
27	KAB. BANDUNG BARAT	96.192.354	1.321.024.978	124.104.828	530.891.348	-	245.021.177	8.244.609	2.325.479.294
28	KAB. PANGANDARAN	52.686.379	574.627.152	33.407.985	165.071.523	-	98.830.876	-	924.623.915
JUMLAH		7.462.745.457	40.715.903.740	1.896.270.128	20.608.133.395	74.232.090	6.336.062.113	168.590.871	77.261.937.794

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI JAWA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	11.902.944.270
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	2.738.547.844
1. DBH Pajak	2.425.937.185
a. Pajak Penghasilan	1.667.781.662
b. Pajak Bumi dan Bangunan	139.138.552
c. Cukai Hasil Tembakau	619.016.971
2. DBH Sumber Daya Alam	309.237.010
a. Migas	57.158.592
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	14.178.698
c. Kehutanan	657.047
d. Perikanan	-
e. Panas Bumi	237.242.673
3. DBH Lainnya	3.373.649
a. Perkebunan Sawit	3.373.649
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	4.042.633.210
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	3.477.145.032
2. DAU ditentukan penggunaannya	565.488.178
a. Penggajian Formasi PPPK	94.412.312
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	317.639.943
d. Bidang Kesehatan	106.920.266
e. Bidang Pekerjaan Umum	46.515.657
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.121.763.216
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	276.679.056
a. Pendidikan	127.831.750
b. Kesehatan	25.809.132
c. Konektivitas	16.770.741
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	44.414.105
h. Pangan Pertanian	26.228.328
i. Pangan Akuatik	35.625.000
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	4.845.084.160
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	3.256.613.072
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	1.545.539.232
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	4.990.090
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	37.191.106
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	200.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	150.000
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. BANDUNG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	4.824.855.680
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	490.351.540
1. DBH Pajak	196.156.587
a. Pajak Penghasilan	88.525.975
b. Pajak Bumi dan Bangunan	107.630.612
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	293.694.953
a. Migas	4.119.441
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	628.791
c. Kehutanan	81.983
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	288.030.933
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	2.607.774.432
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	2.217.499.319
2. DAU ditentukan penggunaannya	390.275.113
a. Penggajian Formasi PPPK	27.877.651
b. Pendanaan Kelurahan	2.000.000
c. Bidang Pendidikan	211.869.127
d. Bidang Kesehatan	121.130.820
e. Bidang Pekerjaan Umum	27.397.515
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.323.626.573
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	253.605.792
a. Pendidikan	12.828.024
b. Kesehatan	6.336.000
c. Konektivitas	200.000.000
d. Air Minum	14.169.758
e. Sanitasi	14.622.010
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	5.650.000
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	1.070.020.781
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	565.372.050
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	417.334.220
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	61.107.311
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	26.207.200
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	396.180.329
E. Insentif Fiskal	6.922.806

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KAB. BEKASI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	3.449.081.425
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	614.388.265
1. DBH Pajak	596.537.069
a. Pajak Penghasilan	548.964.260
b. Pajak Bumi dan Bangunan	47.572.809
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	17.351.196
a. Migas	5.333.013
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.429.967
c. Kehutanan	29.088
d. Perikanan	980.999
e. Panas Bumi	9.578.129
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.535.073.528
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.072.345.215
2. DAU ditentukan penggunaannya	462.728.313
a. Penggajian Formasi PPPK	187.690.933
b. Pendanaan Kelurahan	1.600.000
c. Bidang Pendidikan	196.385.706
d. Bidang Kesehatan	70.185.039
e. Bidang Pekerjaan Umum	6.866.635
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.014.651.762
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	75.929.842
a. Pendidikan	-
b. Kesehatan	49.999.950
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	13.924.033
e. Sanitasi	12.005.859
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	938.721.920
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	529.965.480
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	370.197.248
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	26.559.192
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	12.000.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	284.967.870
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. BOGOR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	5.479.727.674
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	409.775.711
1. DBH Pajak	259.774.665
a. Pajak Penghasilan	196.976.215
b. Pajak Bumi dan Bangunan	62.798.450
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	148.566.015
a. Migas	4.428.560
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	25.210.879
c. Kehutanan	124.951
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	117.967.820
3. DBH Lainnya	1.435.031
a. Perkebunan Sawit	1.435.031
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	2.700.082.763
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	2.175.087.049
2. DAU ditentukan penggunaannya	524.995.714
a. Penggajian Formasi PPPK	84.120.812
b. Pendanaan Kelurahan	3.800.000
c. Bidang Pendidikan	227.633.521
d. Bidang Kesehatan	187.175.145
e. Bidang Pekerjaan Umum	22.266.236
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.744.644.092
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	92.501.549
a. Pendidikan	7.491.689
b. Kesehatan	56.771.190
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	14.119.459
e. Sanitasi	14.119.211
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	1.652.142.543
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	1.036.295.830
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	497.474.225
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	85.608.733
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	32.763.755
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	625.225.108
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KAB. CIAMIS

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.045.080.271
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	57.105.730
1. DBH Pajak	43.778.772
a. Pajak Penghasilan	37.447.149
b. Pajak Bumi dan Bangunan	6.331.623
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	12.826.958
a. Migas	4.095.800
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	639.412
c. Kehutanan	254.395
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	6.986.175
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.216.887.243
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.085.823.581
2. DAU ditentukan penggunaannya	131.063.662
a. Penggajian Formasi PPPK	3.484.706
b. Pendanaan Kelurahan	1.400.000
c. Bidang Pendidikan	39.271.702
d. Bidang Kesehatan	57.656.271
e. Bidang Pekerjaan Umum	29.250.983
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	485.760.482
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	37.124.987
a. Pendidikan	936.163
b. Kesehatan	17.790.724
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	10.455.873
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	7.942.227
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	448.635.495
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	146.891.950
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	243.012.205
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	44.834.486
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	12.956.936
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	539.258
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	269.280.793
E. Insentif Fiskal	16.046.023

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. CIANJUR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	3.443.521.136
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	110.786.200
1. DBH Pajak	65.141.865
a. Pajak Penghasilan	50.884.998
b. Pajak Bumi dan Bangunan	14.256.867
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	44.301.190
a. Migas	4.009.232
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.825.010
c. Kehutanan	260.110
d. Perikanan	1.110.360
e. Panas Bumi	37.096.478
3. DBH Lainnya	1.343.145
a. Perkebunan Sawit	1.343.145
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.912.715.694
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.370.071.512
2. DAU ditentukan penggunaannya	542.644.182
a. Penggajian Formasi PPPK	89.812.500
b. Pendanaan Kelurahan	1.200.000
c. Bidang Pendidikan	241.281.517
d. Bidang Kesehatan	170.810.703
e. Bidang Pekerjaan Umum	39.539.462
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	962.586.379
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	81.141.156
a. Pendidikan	2.879.174
b. Kesehatan	7.500.000
c. Konektivitas	21.494.000
d. Air Minum	14.905.961
e. Sanitasi	14.992.261
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	8.993.760
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	10.376.000
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	881.445.223
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	448.496.616
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	345.724.460
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	66.436.048
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	20.038.099
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	443.232.501
E. Insentif Fiskal	14.200.362

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. CIREBON



(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	3.275.472.921
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	81.586.254
1. DBH Pajak	68.791.671
a. Pajak Penghasilan	58.205.374
b. Pajak Bumi dan Bangunan	10.586.297
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	12.794.583
a. Migas	4.163.073
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	647.154
c. Kehutanan	74.313
d. Perikanan	1.066.442
e. Panas Bumi	6.843.601
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.803.300.515
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.457.034.908
2. DAU ditentukan penggunaannya	346.265.607
a. Penggajian Formasi PPPK	47.392.007
b. Pendanaan Kelurahan	2.400.000
c. Bidang Pendidikan	197.404.705
d. Bidang Kesehatan	86.066.371
e. Bidang Pekerjaan Umum	13.002.524
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	910.155.796
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	121.616.979
a. Pendidikan	3.914.018
b. Kesehatan	55.390.848
c. Konektivitas	27.936.923
d. Air Minum	12.988.653
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	10.483.740
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	10.902.797
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	788.538.817
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	314.607.710
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	382.071.715
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	446.416
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	70.262.316
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	20.000.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Hibah ke Daerah	13.439.040
1. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	13.439.040
2. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	-
E. Dana Desa	466.991.316
F. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. GARUT



(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	3.933.250.992
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	232.199.540
1. DBH Pajak	108.649.248
a. Pajak Penghasilan	47.816.619
b. Pajak Bumi dan Bangunan	60.832.629
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	122.449.448
a. Migas	4.009.232
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	752.816
c. Kehutanan	88.075
d. Perikanan	1.114.355
e. Panas Bumi	116.484.970
3. DBH Lainnya	1.100.844
a. Perkebunan Sawit	1.100.844
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	2.077.669.195
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.638.037.565
2. DAU ditentukan penggunaannya	439.631.630
a. Penggajian Formasi PPPK	37.170.202
b. Pendanaan Kelurahan	4.200.000
c. Bidang Pendidikan	180.840.435
d. Bidang Kesehatan	186.762.578
e. Bidang Pekerjaan Umum	30.658.415
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.105.447.504
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	74.387.494
a. Pendidikan	8.175.436
b. Kesehatan	8.765.050
c. Konektivitas	28.232.141
d. Air Minum	9.280.792
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.986.919
h. Pangan Pertanian	14.947.156
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	1.031.060.010
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	471.326.450
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	427.875.010
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	94.241.230
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	26.187.800
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.028.860
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Hibah ke Daerah	21.627.050
1. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	21.627.050
2. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	-
E. Dana Desa	496.307.703
F. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KAB. INDRAMAYU

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.676.500.723
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	200.269.493
1. DBH Pajak	174.608.411
a. Pajak Penghasilan	59.170.264
b. Pajak Bumi dan Bangunan	115.438.147
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	25.161.082
a. Migas	16.102.662
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	626.725
c. Kehutanan	92.584
d. Perikanan	1.495.510
e. Panas Bumi	6.843.601
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.519.527.010
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.203.389.612
2. DAU ditentukan penggunaannya	316.137.398
a. Penggajian Formasi PPPK	22.511.203
b. Pendanaan Kelurahan	1.600.000
c. Bidang Pendidikan	175.065.779
d. Bidang Kesehatan	107.836.881
e. Bidang Pekerjaan Umum	9.123.535
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	597.067.957
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	30.408.610
a. Pendidikan	435.639
b. Kesehatan	8.774.717
c. Konektivitas	10.577.000
d. Air Minum	7.274.580
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	3.346.674
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	566.659.347
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	276.737.850
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	238.152.757
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	33.018.740
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	18.000.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	352.520.661
E. Insentif Fiskal	7.115.602

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. KARAWANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	3.132.509.826
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	366.721.393
1. DBH Pajak	347.039.330
a. Pajak Penghasilan	292.848.432
b. Pajak Bumi dan Bangunan	54.190.898
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	19.182.063
a. Migas	6.746.032
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.456.591
c. Kehutanan	60.395
d. Perikanan	1.137.126
e. Panas Bumi	9.781.919
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.600.832.444
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.371.586.763
2. DAU ditentukan penggunaannya	229.245.681
a. Penggajian Formasi PPPK	14.356.990
b. Pendanaan Kelurahan	2.400.000
c. Bidang Pendidikan	125.736.464
d. Bidang Kesehatan	71.767.247
e. Bidang Pekerjaan Umum	14.984.980
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	798.752.583
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.635.678
a. Pendidikan	1.875.803
b. Kesehatan	29.635.650
c. Konektivitas	12.449.779
d. Air Minum	6.331.551
e. Sanitasi	11.342.895
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	737.116.905
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	372.981.670
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	295.978.352
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	47.423.483
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	20.733.400
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	358.978.734
E. Insentif Fiskal	7.224.672

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. KUNINGAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.188.759.825
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	57.302.743
1. DBH Pajak	44.574.235
a. Pajak Penghasilan	39.232.297
b. Pajak Bumi dan Bangunan	5.341.938
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	12.728.508
a. Migas	4.095.800
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	642.093
c. Kehutanan	153.264
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	6.986.175
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.225.696.831
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.123.611.626
2. DAU ditentukan penggunaannya	102.085.205
a. Penggajian Formasi PPPK	13.590.355
b. Pendanaan Kelurahan	3.000.000
c. Bidang Pendidikan	46.865.106
d. Bidang Kesehatan	28.134.985
e. Bidang Pekerjaan Umum	10.494.759
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	564.608.544
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.159.025
a. Pendidikan	3.370.151
b. Kesehatan	4.587.859
c. Konektivitas	19.261.412
d. Air Minum	7.108.642
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	5.220.654
h. Pangan Pertanian	4.610.307
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	520.449.519
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	179.506.630
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	280.920.303
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	600.175
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	42.132.166
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	10.326.470
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.563.115
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	341.151.707
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. MAJALENGKA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.253.920.852
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	68.649.182
1. DBH Pajak	55.552.396
a. Pajak Penghasilan	40.926.683
b. Pajak Bumi dan Bangunan	14.625.713
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	12.596.786
a. Migas	4.198.992
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	626.650
c. Kehutanan	93.738
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	6.843.601
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.250.789.429
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.075.787.680
2. DAU ditentukan penggunaannya	175.001.749
a. Penggajian Formasi PPPK	11.615.688
b. Pendanaan Kelurahan	2.600.000
c. Bidang Pendidikan	90.849.377
d. Bidang Kesehatan	58.267.363
e. Bidang Pekerjaan Umum	11.669.321
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	591.723.249
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73.013.600
a. Pendidikan	2.536.452
b. Kesehatan	35.966.713
c. Konektivitas	18.477.558
d. Air Minum	10.398.351
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	615.573
h. Pangan Pertanian	5.018.953
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	518.709.649
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	181.964.670
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	276.211.885
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	37.240.949
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	14.793.200
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.748.945
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	329.095.620
E. Insentif Fiskal	13.663.372

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. PURWAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.624.008.695
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	114.012.158
1. DBH Pajak	96.840.159
a. Pajak Penghasilan	88.309.599
b. Pajak Bumi dan Bangunan	8.530.560
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	16.671.999
a. Migas	4.413.319
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.459.809
c. Kehutanan	183.147
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	9.781.919
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	907.038.981
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	723.541.130
2. DAU ditentukan penggunaannya	183.497.851
a. Penggajian Formasi PPPK	12.428.786
b. Pendanaan Kelurahan	1.800.000
c. Bidang Pendidikan	70.625.005
d. Bidang Kesehatan	81.728.484
e. Bidang Pekerjaan Umum	16.915.576
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	407.987.651
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	40.278.796
a. Pendidikan	1.766.616
b. Kesehatan	5.498.389
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	14.925.863
e. Sanitasi	8.778.157
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	9.309.771
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	367.708.855
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	160.092.020
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	170.345.823
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	25.609.512
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	11.161.500
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	194.969.905
E. Insentif Fiskal	-

**DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SUBANG**



(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.535.398.934
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	186.495.045
1. DBH Pajak	157.901.635
a. Pajak Penghasilan	58.002.645
b. Pajak Bumi dan Bangunan	99.898.990
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	26.584.157
a. Migas	5.907.579
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	630.539
c. Kehutanan	85.336
d. Perikanan	999.678
e. Panas Bumi	18.961.025
3. DBH Lainnya	2.009.253
a. Perkebunan Sawit	2.009.253
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.380.848.245
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.171.962.077
2. DAU ditentukan penggunaannya	208.886.168
a. Penggajian Formasi PPPK	25.322.200
b. Pendanaan Kelurahan	1.600.000
c. Bidang Pendidikan	106.455.321
d. Bidang Kesehatan	62.364.996
e. Bidang Pekerjaan Umum	13.143.651
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	655.040.429
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	77.027.848
a. Pendidikan	3.211.303
b. Kesehatan	27.098.567
c. Konektivitas	24.423.301
d. Air Minum	561.100
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	10.461.502
h. Pangan Pertanian	11.272.075
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	578.012.581
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	237.836.920
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	271.252.189
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	676.960
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	41.559.130
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	18.009.782
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.927.600
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Hibah ke Daerah	14.035.250
1. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	14.035.250
2. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	-
E. Dana Desa	285.167.343
F. Insentif Fiskal	13.812.622

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SUKABUMI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	3.457.793.116
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	240.656.911
1. DBH Pajak	110.227.339
a. Pajak Penghasilan	58.272.540
b. Pajak Bumi dan Bangunan	51.954.799
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	128.635.614
a. Migas	4.009.232
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	4.743.146
c. Kehutanan	170.829
d. Perikanan	1.310.393
e. Panas Bumi	118.402.014
3. DBH Lainnya	1.793.958
a. Perkebunan Sawit	1.793.958
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.910.786.931
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.604.898.347
2. DAU ditentukan penggunaannya	305.888.584
a. Penggajian Formasi PPPK	26.646.388
b. Pendanaan Kelurahan	1.000.000
c. Bidang Pendidikan	150.238.154
d. Bidang Kesehatan	88.359.335
e. Bidang Pekerjaan Umum	39.644.707
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	851.900.843
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	66.626.759
a. Pendidikan	4.871.969
b. Kesehatan	13.132.565
c. Konektivitas	14.404.251
d. Air Minum	13.932.049
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	20.285.925
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	785.274.084
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	378.926.000
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	290.429.118
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	733.794
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	89.957.112
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	24.827.400
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	454.448.431
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KAB. SUMEDANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.086.871.122
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	86.555.125
1. DBH Pajak	54.540.879
a. Pajak Penghasilan	48.685.705
b. Pajak Bumi dan Bangunan	5.855.174
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	31.514.246
a. Migas	4.273.281
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	633.334
c. Kehutanan	107.019
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	25.666.807
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.174.469.109
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.044.094.966
2. DAU ditentukan penggunaannya	130.374.143
a. Penggajian Formasi PPPK	9.292.550
b. Pendanaan Kelurahan	1.400.000
c. Bidang Pendidikan	44.432.626
d. Bidang Kesehatan	53.805.587
e. Bidang Pekerjaan Umum	21.443.380
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	521.571.630
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	39.443.078
a. Pendidikan	6.174.872
b. Kesehatan	18.412.659
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	9.405.288
e. Sanitasi	5.450.259
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	482.128.552
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	174.087.250
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	245.944.121
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	47.259.181
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	14.088.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	275.579.585
E. Insentif Fiskal	28.695.673

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. TASIKMALAYA



(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.787.765.569
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	72.202.145
1. DBH Pajak	48.822.006
a. Pajak Penghasilan	39.371.878
b. Pajak Bumi dan Bangunan	9.450.128
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	22.370.752
a. Migas	4.012.213
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	627.178
c. Kehutanan	161.625
d. Perikanan	1.017.324
e. Panas Bumi	16.552.412
3. DBH Lainnya	1.009.387
a. Perkebunan Sawit	1.009.387
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.586.996.636
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.312.463.220
2. DAU ditentukan penggunaannya	274.533.416
a. Penggajian Formasi PPPK	5.807.844
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	115.537.260
d. Bidang Kesehatan	111.609.487
e. Bidang Pekerjaan Umum	41.578.825
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	696.742.511
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.581.930
a. Pendidikan	7.292.604
b. Kesehatan	20.613.067
c. Konektivitas	12.200.053
d. Air Minum	12.227.073
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	1.249.133
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	643.160.581
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	247.216.260
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	311.285.098
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	64.508.623
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	19.749.940
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Hibah ke Daerah	25.130.750
1. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	25.130.750
2. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	-
E. Dana Desa	399.560.320
F. Insentif Fiskal	7.133.207

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA BANDUNG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	3.019.418.595
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	412.408.811
1. DBH Pajak	387.942.967
a. Pajak Penghasilan	382.996.460
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.946.507
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	24.465.844
a. Migas	4.009.232
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	626.363
c. Kehutanan	35.419
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	18.961.025
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.858.511.513
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.626.378.687
2. DAU ditentukan penggunaannya	232.132.826
a. Penggajian Formasi PPPK	18.352.787
b. Pendanaan Kelurahan	30.200.000
c. Bidang Pendidikan	69.095.225
d. Bidang Kesehatan	88.061.511
e. Bidang Pekerjaan Umum	26.423.303
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	748.498.271
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	23.194.354
a. Pendidikan	3.092.703
b. Kesehatan	17.725.110
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	350.000
e. Sanitasi	2.026.541
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	725.303.917
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	355.305.400
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	300.507.343
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	48.035.484
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	20.950.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA BEKASI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.356.065.146
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	194.732.576
1. DBH Pajak	178.165.264
a. Pajak Penghasilan	164.955.573
b. Pajak Bumi dan Bangunan	13.209.691
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	16.067.312
a. Migas	4.220.464
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.425.461
c. Kehutanan	26.823
d. Perikanan	816.435
e. Panas Bumi	9.578.129
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.477.177.456
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.258.994.483
2. DAU ditentukan penggunaannya	218.182.973
a. Penggajian Formasi PPPK	156.486.549
b. Pendanaan Kelurahan	11.200.000
c. Bidang Pendidikan	50.496.424
d. Bidang Kesehatan	-
e. Bidang Pekerjaan Umum	-
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	684.155.114
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	8.076.043
a. Pendidikan	379.967
b. Kesehatan	2.475.000
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	2.410.527
e. Sanitasi	2.810.549
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	676.079.071
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	364.006.150
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	240.327.173
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	57.745.748
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	14.000.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA BOGOR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.400.294.669
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	110.420.689
1. DBH Pajak	93.812.388
a. Pajak Penghasilan	89.469.234
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.343.154
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	16.108.301
a. Migas	4.009.232
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.455.951
c. Kehutanan	27.394
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	9.781.919
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	891.897.296
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	756.729.494
2. DAU ditentukan penggunaannya	135.167.802
a. Penggajian Formasi PPPK	5.645.224
b. Pendanaan Kelurahan	13.600.000
c. Bidang Pendidikan	70.049.238
d. Bidang Kesehatan	43.485.470
e. Bidang Pekerjaan Umum	2.387.870
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	381.648.777
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	25.697.193
a. Pendidikan	416.600
b. Kesehatan	15.000.000
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	579.400
e. Sanitasi	9.701.193
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	355.951.584
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	184.949.020
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	137.138.726
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	26.548.739
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	7.315.099
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	16.327.907

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA CIREBON

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	921.047.464
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	70.787.605
1. DBH Pajak	58.422.663
a. Pajak Penghasilan	54.383.410
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.039.253
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	12.364.942
a. Migas	4.009.232
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	626.363
c. Kehutanan	27.515
d. Perikanan	858.231
e. Panas Bumi	6.843.601
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	626.787.717
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	559.248.842
2. DAU ditentukan penggunaannya	67.538.875
a. Penggajian Formasi PPPK	18.399.250
b. Pendanaan Kelurahan	4.400.000
c. Bidang Pendidikan	27.031.794
d. Bidang Kesehatan	13.963.712
e. Bidang Pekerjaan Umum	3.744.119
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	223.472.142
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	60.684.822
a. Pendidikan	-
b. Kesehatan	60.684.822
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	162.787.320
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	59.671.470
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	76.646.698
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	22.096.556
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.377.550
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	995.046
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA DEPOK

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.803.026.119
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	135.260.828
1. DBH Pajak	118.621.527
a. Pajak Penghasilan	113.714.214
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.907.313
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	16.139.301
a. Migas	4.040.393
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.455.790
c. Kehutanan	27.394
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	9.781.919
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.157.909.471
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.027.277.414
2. DAU ditentukan penggunaannya	130.632.057
a. Penggajian Formasi PPPK	8.920.848
b. Pendanaan Kelurahan	12.600.000
c. Bidang Pendidikan	83.305.373
d. Bidang Kesehatan	25.805.836
e. Bidang Pekerjaan Umum	-
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	503.018.345
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	22.960.640
a. Pendidikan	-
b. Kesehatan	10.191.343
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	10.649.991
e. Sanitasi	2.119.306
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	480.057.705
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	299.327.820
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	130.137.997
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	38.501.461
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	11.689.767
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	6.837.475

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA SUKABUMI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	751.139.853
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	67.476.839
1. DBH Pajak	45.832.398
a. Pajak Penghasilan	41.990.232
b. Pajak Bumi dan Bangunan	3.842.166
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	21.144.441
a. Migas	4.009.232
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	925.874
c. Kehutanan	40.576
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	15.334.954
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	527.027.624
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	441.972.887
2. DAU ditentukan penggunaannya	85.054.737
a. Penggajian Formasi PPPK	3.484.706
b. Pendanaan Kelurahan	6.600.000
c. Bidang Pendidikan	43.339.132
d. Bidang Kesehatan	24.571.354
e. Bidang Pekerjaan Umum	7.059.545
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	156.635.390
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	16.918.396
a. Pendidikan	2.100.325
b. Kesehatan	2.981.100
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	4.818.464
e. Sanitasi	1.250.000
f. Perumahan dan Permukiman	5.768.507
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	139.716.994
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	59.717.940
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	56.582.972
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	17.835.092
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.075.300
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.000.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA TASIKMALAYA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.168.125.878
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	63.579.070
1. DBH Pajak	50.717.338
a. Pajak Penghasilan	46.566.073
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.151.265
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	12.361.732
a. Migas	4.009.232
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	626.520
c. Kehutanan	48.574
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	6.843.601
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	818.141.128
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	669.157.104
2. DAU ditentukan penggunaannya	148.984.024
a. Penggajian Formasi PPPK	2.936.446
b. Pendanaan Kelurahan	13.800.000
c. Bidang Pendidikan	61.658.441
d. Bidang Kesehatan	56.863.630
e. Bidang Pekerjaan Umum	13.725.507
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	286.405.680
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	30.121.702
a. Pendidikan	3.900.352
b. Kesehatan	11.816.639
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	12.406.098
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	1.998.613
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	256.283.978
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	104.172.230
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	116.205.487
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	27.645.723
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	7.510.538
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA CIMAHI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	915.776.031
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	79.649.028
1. DBH Pajak	55.692.887
a. Pajak Penghasilan	51.819.261
b. Pajak Bumi dan Bangunan	3.873.626
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	23.956.141
a. Migas	3.925.707
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	613.314
c. Kehutanan	34.681
d. Perikanan	816.435
e. Panas Bumi	18.566.004
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	604.161.949
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	514.675.717
2. DAU ditentukan penggunaannya	89.486.232
a. Penggajian Formasi PPPK	31.817.693
b. Pendanaan Kelurahan	3.000.000
c. Bidang Pendidikan	23.419.523
d. Bidang Kesehatan	29.642.687
e. Bidang Pekerjaan Umum	1.606.329
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	216.859.202
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	40.438.834
a. Pendidikan	735.902
b. Kesehatan	30.457.296
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	2.115.000
e. Sanitasi	7.130.636
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	176.420.368
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	83.406.170
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	76.607.786
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12.077.477
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.328.935
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	15.105.852

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA BANJAR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	579.477.799
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	51.945.999
1. DBH Pajak	38.539.666
a. Pajak Penghasilan	34.318.316
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.221.350
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	12.364.015
a. Migas	4.009.232
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	626.363
c. Kehutanan	51.014
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	6.843.601
3. DBH Lainnya	1.042.318
a. Perkebunan Sawit	1.042.318
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	405.515.260
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	322.257.818
2. DAU ditentukan penggunaannya	83.257.442
a. Penggajian Formasi PPPK	28.639.640
b. Pendanaan Kelurahan	1.800.000
c. Bidang Pendidikan	28.935.741
d. Bidang Kesehatan	17.541.743
e. Bidang Pekerjaan Umum	6.340.318
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	96.203.717
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	11.503.152
a. Pendidikan	208.036
b. Kesehatan	6.526.800
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	4.768.316
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	84.700.565
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	26.514.700
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	44.204.484
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	11.372.461
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.608.920
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	18.552.134
E. Insentif Fiskal	7.260.689

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. BANDUNG BARAT

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.325.479.294
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	96.192.354
1. DBH Pajak	70.987.115
a. Pajak Penghasilan	62.014.015
b. Pajak Bumi dan Bangunan	8.973.100
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	24.705.239
a. Migas	4.119.441
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	631.829
c. Kehutanan	159.139
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	18.961.025
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.321.024.978
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.095.278.699
2. DAU ditentukan penggunaannya	225.746.279
a. Penggajian Formasi PPPK	9.826.872
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	101.242.198
d. Bidang Kesehatan	95.079.440
e. Bidang Pekerjaan Umum	19.597.769
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	654.996.176
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	124.104.828
a. Pendidikan	1.401.169
b. Kesehatan	4.206.500
c. Konektivitas	94.301.858
d. Air Minum	4.724.970
e. Sanitasi	2.798.555
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	16.671.776
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	530.891.348
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	259.769.360
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	220.305.043
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	34.878.970
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	15.937.975
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	245.021.177
E. Insentif Fiskal	8.244.609

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. PANGANDARAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	924.623.915
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	52.686.379
1. DBH Pajak	39.281.980
a. Pajak Penghasilan	33.633.075
b. Pajak Bumi dan Bangunan	5.648.905
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	12.698.365
a. Migas	4.009.232
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	626.363
c. Kehutanan	128.471
d. Perikanan	1.090.698
e. Panas Bumi	6.843.601
3. DBH Lainnya	706.034
a. Perkebunan Sawit	706.034
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	574.627.152
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	494.982.221
2. DAU ditentukan penggunaannya	79.644.931
a. Penggajian Formasi PPPK	8.130.982
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	35.218.127
d. Bidang Kesehatan	25.479.977
e. Bidang Pekerjaan Umum	10.815.845
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	198.479.508
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	33.407.985
a. Pendidikan	1.767.364
b. Kesehatan	25.808.564
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	5.832.057
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	165.071.523
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	51.630.250
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	94.189.767
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	14.752.406
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.499.100
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	98.830.876
E. Insentif Fiskal	-

TIM PENYUSUN

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2025

PEMBINA	:	Luky Alfirman	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
PENGARAH	:	1. Ludiro 2. Sandy Firdaus 3. Purwanto 4. Jaka Sucipta 5. Lydia Kurniawati Christyana 6. Adriyanto 7. Agung Widiadi	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Dana Transfer Umum Direktur Dana Transfer Khusus Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
KETUA	:	Iwan Richard Butarbutar	Ketua Tim Reguler Penyaluran Dana Transfer
ANGGOTA	:	Kindy Rinaldy Syahrir, Mauliate Harnalyes Silitonga, Yuni Ariani, Bondan Widyatmoko, Aan Prianto, Ricka Yunita Prasetya, Tatang, Endah Pusparini, Rini Anjar Sari, Rahmatullah Priyo Kusuma, Ryan Andhika Wahyu Putra, Honiar Arfianto	
KONTRIBUTOR DATA	:	1. Tim Reguler Dana Alokasi Umum 2. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 3. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Non Sumber Daya Alam 4. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Umum 5. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pengembangan Manusia dan Kebudayaan 6. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman 7. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik 8. Tim Reguler Hibah Daerah 9. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Khusus 10. Tim Reguler Pengelolaan Dana Desa 11. Tim Reguler Dana Otonomi Khusus 12. Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan 13. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	



TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan

Gedung Radius Prawiro, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1
Jakarta-10710



2025

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025



**Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta – 10710

www.djpk.kemenkeu.go.id

